



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DIAN RACHMAT YANUAR**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH**
3. NHK : **95695**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 8.480.000.000

1. Tanah Seluas 390 m2 di KAB / KOTA CIREBON, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/100 m2 di KAB / KOTA
KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/80 m2 di KAB / KOTA
KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/80 m2 di KAB / KOTA
KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 700 m2/400 m2 di KAB / KOTA
KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
6. Tanah Seluas 180 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI
Rp. 210.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/64 m2 di KAB / KOTA
KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
8. Tanah Seluas 290 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000
9. Tanah Seluas 156 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000
10. Tanah Seluas 279 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL SENDIRI
Rp. 300.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/64 m2 di KAB / KOTA
KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 293 m2/160 m2 di KAB / KOTA



KUNINGAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.540.000.000

13. Tanah Seluas 1426 m2 di KAB / KOTA KUNINGAN, HASIL

SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERTAGIH	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	166.734.250
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.646.734.250
III. HUTANG	Rp.	4.924.124.145
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.722.610.105

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.